

**PERBANDINGAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGUSAKAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT  
UMUM DENGAN OKNUM ANGGOTA MILITER  
(PUTUSAN NOMOR:131/PID.B/2020/PN.MNK DENGAN PUTUSAN  
NOMOR:48-K/PM.III-12/AD/V/2016)**

Arnoldus Alverando Kale<sup>1</sup>, Helvis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

<sup>2</sup>Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

[arnoldalverando@gmail.com](mailto:arnoldalverando@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Criminal Law Sanctions Against Crime of Destruction Committed by the General Public and Military Members, Writing this thesis aims to raise the issue of a criminal act of vandalism committed by the general public and members of the military, whether Decision Number 131 / Pid.B / 2020 / PN. Mnk and Decision Number 48-K / PM.III-12 / AD / V / 2016 are in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, and know whether there are legal sanctions that are different from those carried out by individual members of the military with the general public, to explain How is the legal sanction for the criminalization of the perpetrator or the defendant of a criminal act of damage committed by an unscrupulous member of the Military, because the Military has its own Criminal Code, namely the KUHPM. But it is still related to the KUHP because legal sanctions that are not listed in the KUHPM can be subject to legal sanctions that are contained in the KUHP while there are no deviations stipulated by the applicable law. So this research uses the basis of legal norms and legal principles, be it in statutory regulations or law in court decisions. The writing of this thesis is descriptive analysis, namely the writing intended to describe the data as accurately as possible. The data in writing this law consists of secondary data or secondary legal materials, namely materials that provide an explanation of the primary legal materials sourced from existing books and literatures.*

*Keywords: General Public, Management Crime, Military Member.*

**ABSTRAK**

Sanksi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum dan Anggota Militer, Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengangkat permasalahan sesuatu tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh masyarakat umum dan oknum anggota militer, Apakah Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN.Mnk dan Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/V/2016 sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan mengetahui adakah Sanksi Hukum yang berbeda dari yang dilakukan oleh oknum anggota militer dengan masyarakat umum, untuk menjelaskan bagaimanakah sanksi hukum pembedaan terhadap pelaku atau terdakwa suatu tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh oknum anggota Militer, karena Militer mempunyai suatu aturan Hukum Pidana tersendiri yaitu KUHPM. Tetapi masih berhubungan juga dengan KUHP karena sanksi aturan hukum yang tidak tercantum di dalam KUHPM bisa dikenakan sanksi hukum yang terdapat di dalam KUHP selagi itu tidak ada suatu penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang yang berlaku. Maka penelitian ini menggunakan basis pada norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik itu dalam peraturan perundang-undangan ataupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan, penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis yaitu penulisan yang dimaksud untuk menjabarkan data yang seteliti mungkin. Data dalam penulisan hukum ini terdiri dari data sekunder atau bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur yang ada.

Kata Kunci : Anggota Militer, Masyarakat Umum, Tindak Pidana Pengrusakan.